

Perempuan Alor di Pusaran Budaya Belis: Sebuah Pendekatan Etnografis Melalui Revitalisasi Budaya

Anil Dawan

Wahana Visi Indonesia

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai perempuan di Alor, Nusa Tenggara Timur dalam pusaran Belis ada dalam dilema yang membatasi upaya pemberdayaannya. Revitalisasi budaya berkaitan erat dengan isu perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, karena itu perlu melakukan rekonstruksi terhadap konstruk sosial yang ada dan berlangsung, namun berdampak pada pemiskinan yang sistematis, di mana hak-hak perempuan dan hak-hak dasar anak tidak dipenuhi. Proses revitalisasi dimulai dari atau cara pandang yang memengaruhi kehidupan manusia secara ras, agama, etnisitas dan komunitas. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif etnografi untuk memotret kehidupan kaum perempuan Alor dalam pusaran budaya Belis dan bagaimana dampaknya terhadap pemberdayaan perempuan. khususnya pendidikan dan kesejahteraan. Hasilnya ditemukan kesadaran kolektif bersama 3T (tiga tungku) yaitu tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah. Kesadaran kolektif hasil dari proses perjalanan panjang dan kolaborasi kombinatorial antara “orang dalam” yang mau berubah, orang tengah yang menjadi pendamping dan fasilitator perubahan dan pemerintah sebagai stake holder kunci yang memberikan dukungan daya, dana dan doa.

Kata Kunci: revitalisasi budaya, pemberdayaan perempuan, belis.

Abstract: *This article discusses about women in Alor in the Belis vortex in a dilemma that limits its empowerment efforts. Cultural revitalization is closely related to the issue of child protection and empowerment of women, therefore it is necessary to reconstruct existing and ongoing social constructs, but it has an impact on systematic impoverishment, where women's rights and children's basic rights are not met. The revitalization process starts from the perspective that influences human life in terms of race, religion, ethnicity and community. This research method uses qualitative ethnography to photograph the lives of Alor women in the vortex of Belis culture and how it impacts on women's empowerment. especially education and well-being. The result was the collective awareness of 3 Triple Helix (three stoves, namely traditional leaders, religious leaders and the government). Collective awareness results from a long process of journey and combinatorial collaboration between people who want to change, middle people who become assistants and change facilitators and the government as a key stake holder that provides power, funding and prayer support.*

Keywords: *cultural revitalization, empowerment of women, belis*

Koresponden penulis:

Anil Dawan, Wahana Visi Indonesia

Graha Bintaro GK/GB 2 No 9 Tangerang Selatan; E-mail: anil_dawan@wvi.or.id

PENDAHULUAN

Tradisi *belis*, dengan *moko* (gendang)¹ dan *gong* (alat musik tradisional)² yang menjadi ciri masyarakat Kabupaten Alor sesungguhnya adalah salah satu budaya lokal yang telah sepakat untuk direvitalisasi. *Belis* adalah ritual penghargaan dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dalam membangun hubungan kekeluargaan adalah sebagai tanda terima kasih kepada keluarga memperlai perempuan pindah tempat atau klan ke dalam klan keluarga mempelai laki-laki. *Belis* merupakan bagian utama dari ritual perkawinan adat dan menentukan sah atau tidaknya perkawinan adat yang dilangsungkan sebagai imbalan jasa atas jerih payung orang tua, sebagai tanda penggantian nama memperlai perempuan artinya menurunkan nama keluarga si gadis dan mengangkat nama keluarga laki-laki.

Para tetua adat, kepala desa dan tokoh masyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap nasib masyarakat, kaum perempuan, dan kelangsungan masa depan anak-anak, kini sepakat untuk merevitalisasi budaya *belis* agar benar-benar bermanfaat sebagai acuan budaya bagi masyarakat Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuannya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Budaya *belis* yang merupakan simbol pinangan dari keluarga pengantin laki-laki ke keluarga pengantin perempuan, tidak lagi sekadar tanda ikatan dan kesepakatan pernikahan dua keluarga. *Belis* merupakan tradisi yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun dari generasi ke generasi di kalangan masyarakat Alor, ternyata dalam perjalanannya mulai mengalami pergeseran. Alih-alih menjadi simbol cinta kasih dan ikatan cinta, dalam praktiknya *belis* telah bergeser menjadi tradisi yang membelenggu dan bahkan menjadi bara api dendam, praktik penipuan dan juga mengalami proses komersialisasi. *Belis* yang semula merupakan tradisi untuk menjaga keseimbangan kosmos dalam keluarga dan dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pernikahan sepasang kekasih yang saling mencintai, pelan-pelan telah berubah menjadi budaya yang kontra-produktif (Suyanto 2018).

¹ Nekara berbahan perunggu (walau ada moko berbahan perunggu berlapis emas) yang berbentuk mirip dengan gendang dengan motif bervariasi, berfungsi dalam ritual adat; antara lain *belis* pada perkawinan adat, alat musik dalam iringan lagu-lagu tradisional (termasuk *lego-lego*) disimpan sebagai benda pusaka klan dst.

² Alat musik tradisional berbentuk bulat dan di tengah-tengah sedikit menonjol dan lazim dipukul pada bagian tengah untuk mengeluarkan bunyi.

Melihat dan sekaligus merasakan pergeseran budaya *belis* yang menjurus makin kontra-produktif, maka para tetua adat, tokoh masyarakat dan kepala desa yang telah sepakat, mendukung upaya revitalisasi budaya masyarakat Alor. Akibat penetapan *belis* yang makin lama makin mahal, bisa mencapai nominal ratusan hingga miliaran rupiah, seringkali menyebabkan keluarga pengantin laki-laki maupun perempuan mengalami berbagai penderitaan. Laki-laki yang tidak mampu membayar dan melunasi belis kepada pihak keluarga pengantin perempuan, biasanya akan cenderung dilecehkan, dan dipanggil dengan sebutan *maya*, yang berarti budak. Sementara itu, sebaliknya tidak jarang pengantin perempuan akan diperlakukan layaknya budak dan acapkali pula memperoleh perlakuan kasar (KDRT) suaminya setelah belis dilunasi. Memukul istri di kalangan masyarakat Alor dianggap sama seperti laki-laki yang memukul *moko*, karena mereka merasa sudah membayar lunas belis yang ditetapkan. Belis, *moko* dan gong dalam kacamata teori Geertz (1973) merupakan simbol yang berkaitan untuk mengatur tata pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta antara klan yang satu dengan lainnya sehingga memiliki konsekuensi sangsi, cara pandang dan keberadaan laki-laki laki dan perempuan karena didalam pola relasi dan kehidupan sosial tersebut memiliki makna sosial.

Simbol-simbol yang dimiliki manusia terdapat suatu golongan yang merupakan suatu sistem tersendiri yang dinamakan sebagai simbol-simbol suci yang bersifat normatif dan mempunyai kekuatan yang besar dalam pelaksanaan sanksi-sanksinya disebabkan simbol-simbol suci tersebut merupakan etos (*ethos*) dan pandangan hidup (*world view*) unsur hakiki bagi eksistensi manusia dan juga karena simbol-simbol suci terjalin dalam simbol-simbol lainnya yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya yang nyata (Geertz 1973, 88).

Geertz mengatakan bahwa ketika melakukan kajian mengenai agama, mitos dan upacara sebagai jalan untuk memahami bagaimana manusia memahami dan menerima hakekat dari kehidupan sosial di masyarakatnya, dimana simbol menjadi kendaraan yang mengantarkan kepada pemahaman kita (*the vehicle of meaning*). Antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar, yang dengan mana pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan; ada dalam hal ini pemikiran manusia dapat dilihat sebagai "*suatu bentuk sistem lalu lintas dalam bentuk simbol-simbol yang signifikan*". Dengan demikian sumber dari simbol-simbol itu dua, yaitu (1) yang berasal dari kenyataan luar yang terwujud sebagai kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi; dan (2) yang berasal dari dalam dan yang terwujud melalui konsepsi-konsepsi dan struktur-

struktur sosial. Dalam hal ini simbol-simbol menjadi dasar bagi perwujudan model bagian dari sistem-sistem konsep dalam suatu cara yang sama dengan bagaimana agama atau keyakinan mencerminkan dan mewujudkan bentuk-bentuk sistem sosial.

Awal Perubahan

“*Saya adalah kepala suku tetapi saya adalah orang yang bodoh di suku ini*” demikianlah perkataan yang meluncur dari Bapak Yusuf Tangpeni (hasil wawancara penelitian, Desember 2017). Kata-kata itu meluncur dari laki-laki tua berperawakan kurus dengan sorot mata yang tajam namun ramah yang sudah menginjak usia 78 tahun sesuai penuturannya di rumahnya yang juga menjadi rumah adat Suku Abui (Rumpun AKHAM) Desa Moramam, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Ungkapan tersebut adalah ekspresi kegundahannya dalam menilai dirinya sendiri. Mengapa beliau yang adalah seorang kepala Suku Abui (AKHAM) di ABAD (Alor Barat Daya) hingga melontarkan pernyataan seperti itu. Pengungkapan jujur Bapak Yusuf yang lebih dikenal sebagai Bapak “Usu” mewakili kegundahannya karena memang benar adanya bahwa indikator IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 62,67 NTT menurut data tahun 2015, dan Alor adalah salah satu dari 7 (tujuh) Kabupaten yang IPM-nya tergolong rendah, dengan angka harapan sekolah hanya 11,41%. Angka ini memiliki *gap* cukup jauh dibandingkan dengan IPM tertinggi di NTT yaitu kota Kupang 15,75%³.

Jelas sudah, bahwa kegundahan tentang “kebodohan” yang mendera rumpun adat AKHAM yang dinyatakan oleh Bapak Yusuf Tangpeni mewakili kegundahan kondisi makro IPM Alor yang rendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu apa hubungannya dengan budaya? Apakah budaya memiliki dampak dalam kondisi IPM Alor secara keseluruhan? Bagaimana melihat hubungan semantik antara budaya dan indeks pembangunan manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak? Bagaimana melihat hubungan semantik antara belis, moko dan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga, anak-anak di ABAD (Alor Barat Daya) dan Kabupaten Alor secara keseluruhan. Domain dan toksonomik inilah yang digumuli untuk dituliskan dalam bingkai penelitian kualitatif etnografi proses revitalisasi yang sudah, sedang dan akan

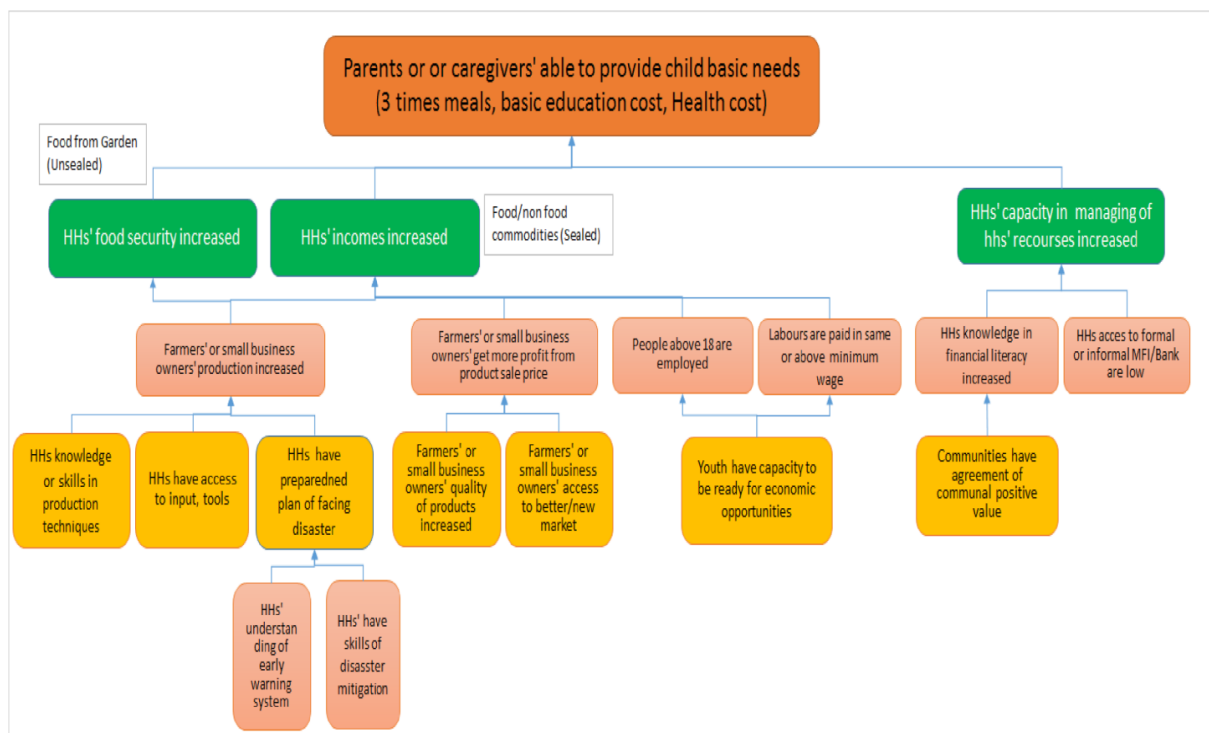
³ Berita Resmi statistik No 16/07/Th.XIX, 01 Juli 2016. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup

terjadi di Alor dimana Wahana Visi Indonesia (WVI) sebagai organisasi sosial kemanusiaan Kristen menjadi bagian sentral sebagai fasilitator pendamping dari proses pemberdayaan tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

Secara *logical framework* revitaliasi budaya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan pemberdayaan perempuan untuk dapat menyediakan kebutuhan bagi anak-anak dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Kesepakatan komunal yang positif akan menjadi rujukan untuk menyederhanakan biaya sosial yang tinggi dimana peran perempuan diberdayakan tidak sekedar menjadi obyek melainkan menjadi subyek bagi pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Alur bingkai pemikiran adalah sebagai berikut:

Bagan 1. *Logical Framework* Revitaliasi Budaya Untuk Mendukung Anak dipenuhi Haknya dan Perempuan Diberdayakan.



Intervensi di tingkat lokal yaitu: Membangun kapasitas rumah tangga (termasuk petani/pemilik usaha): Meningkatkan produksi dan keuntungan dari batas harga komoditas dan produk usaha petani, kecerdasan finansial, kebutuhan anak, dan perlindungan anak. Membangun kemitraan dengan institusi lokal dan pembeli, Membangun kemitraan dengan institusi keuangan, Membangun hubungan antara 3 Pilar Utama (Pemuka agama, tokoh adat, dan pemerintah) melalui forum Tiga tungku (3T) yang berfungsi, Membangun kesepakatan mengenai nilai-nilai positif bersama di setiap wilayah adat. Kesepakatan sosial yang positif akan menjadi rujukan masyarakat, agama dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan perempuan,

Ditinjau dari lokus demografis dan etnografis Penduduk Kabupaten Alor memiliki keragaman suku, jumlahnya kurang lebih 50 suku. Ditambah lagi beberapa suku pendatang dari luar wilayah yang selama ini masuk ke Alor dan melakukan interaksi sosial. Keragaman suku asli tersebut maupun suku pendatang juga tidak terlepas dari keragaman bahasa ibu yang berjumlah kurang lebih 56 bahasa ibu yang dikelompokkan dalam 13 rumpun Bahasa yang antara satu dengan lainnya sangat berbeda untuk dimengerti (WVI 2014). Kabupaten Alor yang dihuni sekitar puluhan suku dan memiliki puluhan ragam bahasa daerah yang dikelompokkan ke dalam berbagai rumpun budaya, dari satu sisi memang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Tetapi, di sisi yang lain, kekayaan budaya yang dimiliki masyarakat Alor, ada indikasi dan dirasakan mulai terdegrasi menjadi momok yang menakutkan. Masyarakat, tetua adat, kepala desa dan tokoh masyarakat yang hidup dan menyaksikan langsung bagaimana budaya *belis* menyebabkan proses marginalisasi dan dehumanisasi perempuan dan anak, akhirnya memutuskan untuk mengkaji ulang dan menetapkan roh baru dalam budaya *belis*.

Nilai-nilai budaya dan adat sangat dihormati di Alor, terbukti dengan adanya Lembaga Adat di tingkat satuan kerja adat (rumpun adat) dan tingkat Kabupaten. Keberadaannya diakui dan dilibatkan dalam Musrembang. Sebelum revitalisasi budaya dilaksanakan, kedudukan laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki beban untuk proses pembayaran belis. Belis yang mahal juga menyebabkan rata-rata 3-5 perempuan di Alor tidak menikah⁴. Para tetua adat dan tokoh masyarakat yang secara normatif biasanya paling sulit diajak berubah karena kekhawatiran perubahan yang terjadi akan

⁴ Fakta ini ditemukan sebagai bagian dari ketidaksetaraan gender di mana perempuan tidak memiliki ruang partisipatif menentukan hak dan masa depannya karena budaya dan adat istiadatnya.

merongrong eksistensi kulturalnya di mata masyarakat, di Kabupaten Alor yang terjadi justru sebaliknya. Seluruh tetua adat inilah dengan segala kebijakan dan kearifannya justru menjadi pihak yang menginisiasi perubahan dan revitalisasi budaya *belis*, karena semua menyepakati bahwa praktik pelaksanaan budaya *belis* di lapangan lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat bagi masyarakat Alor. Seluruh pengalaman yang terjadi di masyarakat Alor dengan tradisi *belis* yang kontra-produktif, dan kemudian disepakati tradisi itu perlu direvitalisasi, adalah sebuah contoh yang menarik, dan tentu sayang jika tidak dibagikan kepada orang-orang atau masyarakat lain yang mengalami persoalan yang sama. Dalam rangka berbagi pengalaman yang luar biasa, dan dalam rangka menjadikan perubahan yang terjadi di masyarakat Alor sebagai cermin bagi masyarakat lain yang mengalami problema yang sama agar dapat belajar dari pengalaman yang terjadi di masyarakat Alor.

METODOLOGI

Penelitian lapangan kualitatif mengenai etnografi (Spradley 1997, 3) yaitu pekerjaan mendeskripsikan kebudayaan dengan tujuan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Dengan demikian penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Inti dari etnografi adalah upaya memperhatikan makna tindakan dari kejadian yang dialami orang yang ingin kita pahami. Beberapa makna tersebut terekspresikan secara langsung dalam bahasa, dan banyak yang diterima dan disampaikan hanya secara tidak langsung melalui kata dan perbuatan.

Proses etnografi menurut Spradley dimulai dari pendefinisian mengenai budaya, bahwa kebudayaan adalah menunjuk pada pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial. Peran etnografer adalah mengamati tingkah laku, tetapi lebih daripada itu juga menyelidiki makna tingkah laku tersebut. Selanjutnya etnografer melihat berbagai artefak dan objek alam tetapi lebih daripada itu dia juga menyelidiki makna yang diberikan oleh orang-orang terhadap berbagai obyek itu. Metode pengumpulan data menggunakan KII (*Key Informant Interview* atau wawancara mendalam dengan informan) dan FGD (*Focus Group Discussion* atau diskusi kelompok terfokus). Penelitian ini terdiri dari 12 informan yang terdiri dari lima orang tokoh adat yang berperan dalam revitalisasi budaya, dua orang staf

WVI yang menjadi fasilitator revitalisasi budaya, dua orang tokoh agama, dan tiga orang tokoh pemerintah.

PEMBAHASAN

Moko dan Kesempatan Pendidikan Bagi Anak dan Perempuan

Moko dan Pendidikan di Alor ternyata berkorelasi begitu erat. Pelaksanaan kawin adat di Suku Abui pada jaman dulu menggunakan belis dengan jumlah moko yang sangat banyak. Kira-kira 70-80 Moko yang nilainya jika dinominalkan mencapai antara kurang lebih sekitar Rp. 300 juta. Nilai sejumlah itu pun harus melalui proses panjang “tarik-tarik” (*bermusyawarah*) yang dibebankan pihak perempuan kepada pihak laki-laki saat mereka akan menikah. Salah satu suku yang melaksanakan pembelisan tersebut adalah kelompok suku AKHAM (yang terdiri dari 4 suku yaitu: Suku Abui, Klon, Hamap, Masin). Memang, pada awalnya menurut penuturan historis, peraturan adat ini dianggap sebagai kebanggaan identitas dan keluarga besar.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan kendala-kendala yang ada seperti mahalnya harga moko karena semakin langka di pasaran, dan ketidakmampuan masyarakat memenuhi jumlah moko yang harus dibayarkan sebagai belis dan sebagainya, maka muncul dorongan alamiah yang mereka sebut sebagai “*kairos*” (baca: waktu Tuhan) untuk menyederhanakannya. Lebih tepatnya setelah Area Development Program (ADP) Alor dengan proyek Revitalisasi Budaya, khususnya melalui kehadiran staf Wahana Visi Indonesia Slamet Kusharyadi yang merupakan informan dalam penelitian ini digaungkan maka disadari oleh Kelompok Suku AKHAM bahwa aturan adat pembelisan merupakan hal yang membebani karena menyebabkan banyak hal terkait dengan pembangunan tidak berjalan, pendidikan tidak diurus, bahkan kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah, khususnya kaum perempuan dan anak-anak. Saksi hidup yang mengalami, merasakan beban belis menuturkan dengan gamblang baik disampaikan oleh Bapak Yusuf Tangpeni dan Bapak Salmun. Mereka berujar demikian:

Proses penyatuan adat kelihatanya kita kurang mengerti kurang pendidikan berdasarkan belis yang terlalu tinggi, saya menjadi pelopor besar untuk menurunkan belis terlalu tinggi, 70-80 moko, kalau ditotal dikurangkan mati di 60, boleh tarik tarik sudah tidak turun lagi. Tidak ada orang yang pintar sampe SMA, kuliahpun tidak (Bapak Yusuf Tangpeni, KII di Desa Moramam, Desember 2017)

Pendidikan tidak diurus⁵, pembangunan tidak bisa, dan tidak bisa diatur, takut kawin, Sumber Daya Manusia (SDM) rendah dan kasus-kasus hamil diluar nikah, anak-anak diarahkan bayar belis (Bapak Salmun, KII di Desa Moramam, Desember 2017)

Dari ungkapan kedua tokoh tersebut dapat dilukiskan hubungan semantik bahwa belis dengan jumlah moko yang banyak dan tinggi nilainya menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat, keluarga dan anak-anak menjalani kehidupan mereka karena harus membayar biaya kepatutan dan kewajiban adat. Dana, daya keluarga besar diarahkan sepenuhnya pada tuntutan pada prosesi biaya kawin mawin yang semacam menjadi “belunggu” kehidupan. Investasi dan ketahanan keluarga menjadi lemah karena seluruh dana dan sumber daya yang ada hanya untuk membayar biaya sosial yang dianggap sebagai “hutang adat”. Dilihat dari perspektif mandat budaya dan meneruskan garis keturunan, maka menimbulkan pertanyaan dan kegelisahan tersendiri karena memiliki kontras di antara keduanya. Apakah jika kehendak Tuhan Allah untuk beranak cucu dan memenuhi bumi (meneruskan keturunan, melanjutkan regenerasi) terhenti karena budaya belis yang tinggi dan membebani? Dua nilai ini bertemu dalam hati Yusuf Tangpeni Sang Kepala Suku melahirkan kegelisahan tersendiri. Kegelisahan karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anak-anak, khususnya anak perempuan yang tidak mendapatkan akses dan dukungan terhadap pendidikan dan kesempatan untuk membangun kehidupan masa depan yang lebih baik.

Kegundahan Yusuf Tangpeni nampaknya tak hanya karena nilai belis yang tinggi dengan Moko yang banyak dan mahal nilainya akan membebani masyarakat. Namun perasaan terbebani itu juga dialaminya. Kegundahan itu menyatu dalam dirinya karena sebagai kepala suku, beliau harus memelihara adat istiadat. Mempertahankan warisan leluhur dan menjaganya supaya dilanjutkan pada anak cucu. Namun di lain pihak sebagai kepala keluarga dan seorang bapak, beliau memiliki empat anak yang terdiri dari tiga laki-laki dan satu perempuan. Akan tetapi malang tak dapat ditolak, untung tidak bisa

⁵ Anak remaja siap untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan ekonomi. Dari anak-anak yang mendapatkan bantuan program WVI setelah kurun waktu 16 tahun saat ini mereka sudah bertumbuh menjadi orang dewasa. Beberapa diantara mereka mampu menggapai mimpi dan cita-cita mereka, sebagai guru, perawat, pendeta, TNI, Polisi, PNS dst. Sementara anak-anak lainnya berupaya meraih pendidikan tinggi untuk mencapai harapan mereka." *Saya tidak bisa membayangkan seandainya saya tiak mendapatkan dukungan WVI melalui anak santun. Wilayah program WVI mengajarkan kepada saya untuk memiliki iman supaya saya dapat menggapai mimpi saya*". Kata seorang anak bernama Teroci Lanfai pengurus forum anak di desa Lembur Kabupaten Alor. Sumber: Annual Report ADP ALor Tahun 2015.

diraih ketiga anak laki-laknya meninggal. Kondisi tersebut sempat menimbulkan perbedaan pendapat dengan isterinya. Bapak Yusuf mengatakan bahwa jika terus bertahan dengan belis yang tinggi dan jumlah moko yang banyak, maka dikhawatirkan tidak akan ada laki-laki yang menikah dengan anak perempuannya. Lalu bagaimana dengan generasi penerus keturunannya?

Maka ketika anak perempuannya pergi ke Atambua, dan ada seorang laki-laki yang menyukai anaknya dan bermaksud menikah dengan anaknya, Bapak Yusuf meminta laki-laki itu “kawin masuk” artinya, pihak laki-laki menjadi anaknya. Urusan adat semua beres, semua bisa berlaku untuk siapapun. Anak laki-laki ini keluar dari suku bangsanya, dan masuk menjadi seperti anak kandung Bapak Yusuf. Dan sekarang dari anak perempuannya itu lahirlah tujuh anak, empat perempuan dan tiga laki-laki. Dari dua kegelisahan memilih antara memiliki banyak moko atau memiliki keturunan? Bapak Yusuf memilih “*lebih baik punya anak cucu dari pada Moko ada tetapi tidak mempunyai keturunan.*” Ungkapan itu jelas menggambarkan kegundahan hatinya yang terjawab dan terasa *plong* serta lega dari belunggu adat yang membebani. Menghambat generasi penerus dari keturunannya berlangsung terus atau terhenti. Belis dan moko dianggapnya menjadi hal yang menentukan apakah generasi penerus berlanjut atau tidak.



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 1. Koleksi Moko Yusuf Tangpeni



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 2. Moko Terbesar



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 3. Koleksi Moko Yusuf Tangpeni

Nampak sekali bahwa jawaban Bapak Yusuf Tangpeni mengenai pertanyaan “*apakah adat istiadat dan budaya itu untuk manusia, atau manusia untuk adat istiadat dan budaya?*”. Akhirnya berakhir pada kesimpulan sebagai pemaknaan terhadap praktik budaya yang dijalannya bahwa budaya dan adat istiadat adalah untuk manusia, kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia, termasuk beranak cucu dan meneruskan keturunannya. Yusuf Tangpeni secara tidak langsung menyatakan bahwa perempuan bukanlah korban dari adat-istiadat dan budaya, melainkan menjadi aktor yang berkontribusi terhadap masa depannya.

Kegunaan Moko dalam Konteks Pembelian Perkawinan di AKHAM

Pemanfaatan moko pada kalangan masyarakat bawah sampai atas berlaku sama. Kalau dihitung dengan uang harganya sekitar Rp. 300 juta. Tujuan dari pembelian dengan

moko sendiri sejatinya sudah menjadi belis perempuan. Meski belis dilakukan secara turun temurun, namun ada semacam perasaan mengakui dan bertanya-tanya bahwa manusia seperti diperjualbelikan. Wahana Visi Indonesia masuk ke Alor untuk mensponsori revitalisasi budaya merangkul tua-tua adat. Kekhawatiran akan punahnya moko ternyata terjadi karena diperjualbelikan ke pasar bebas ke luar negeri. Proses revitalisasi budaya pertama dimulai di Wolatang supaya moko diuangkan dan disederhanakan.

Sejumlah moko diberikan untuk orang tua anak perempuan yang akan dibagikan kepada keluarganya masing-masing. Pertanyaan menggelitik yang kami ajukan adalah “*bukankah jika jumlah moko banyak mengapa takut punah?*” ketika keluar pernyataan dari Bapak Salmun yang mengatakan “*jika demikian lama-lama moko akan menjadi punah.*” Punahnya moko karena besarnya permintaan, sedangkan persediaannya makin berkurang karena dibawa ke luar negeri atau hal lainnya. Selain moko ada barang lain yaitu gong, selimut, sarung, babi, kambing, beras, celana atau cawat. Semua mesti ada untuk perkawinan. Semuanya disertakan supaya bisa sembahyang. Semua barang-barang itu untuk belis. Moko memiliki banyak nama, dan berjenis-jenis. Kepala adat punya anak perempuan harus taruh Moko Jawa. Kalau kepala adat karena raja maka dia harus taruh moko yang paling tinggi. Mengapa demikian? Karena untuk menjaga wibawanya. Kalau masyarakat biasa disesuaikan dengan kemampuannya paling tidak bunga tangan panjang atau Moko Makasar.

Jumlah moko dalam pernikahan ditentukan oleh percakapan yang dilakukan oleh juru bicara dari pihak laki-laki dan perempuan. Suku Abui paling tinggi karena merupakan suku terbesar. Sedangkan tata caranya adalah enam orang yang ada datang menghadap orang tua laki-laki, lalu menentukan narasumber yang disertai biji jagung. Ada pihak yang wawancara, semua pekerjaan yang ada mengorbankan waktu. Waktu bicara selama tujuh hari, siang tidak bicara malam baru bicara, sekurang-kerangnya satu atau dua hari. Jika orang tidak punya moko maka dia harus pinjam ke keluarga besar atau orang lain. Nilai budaya mengatur lingkaran hidup manusia sejak lahir, tumbuh, dewasa dan mati. Perkawinan adalah peristiwa dalam lingkaran hidup manusia yang menjamin adanya keberlanjutan generasi. Perkawinan seharusnya dipandang sebagai pencetak generasi berkualitas, dan menyangkut hubungan antar individu, keluarga yang pada

akhirnya menjadi bagian dari perekat masyarakat dan memperkuat kohesi sosial (Koesbardiati 2019).

Hidupku Bukannya “aku” Lagi

Perubahan di AKHAM nampaknya benar terjadi. Perubahan yang meliputi cara berpikir, cara memandang belis dan moko. Cara memandang perkawinan, cara melihat nilai dan martabat laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Perubahan itu nampak dari pertanyaan sebagai berikut:

Dari pastor, dari pendeta, saya berpikir untuk cara kebaikan. Saya orang yang paling keras di Alor Barat Daya. Apa yang dicari di hukum adat, kelihatannya perubahannya luar biasa, 2-3 tahun belakangan. Tidak ada yang mengikat kita (Yusuf Tangpeni, Rumah Adat Desa Moramam Suku Abui, Desember 2017).

Perubahan nampaknya dialami para informan yaitu Bapak Yusuf Tangpeni, Bapak Salmun, Bapak Sem Bangkay, Bapak Immanuel Yopa, Bapak Asshorudin Songkay. Dua nama yang disebutkan belakangan merupakan generasi muda yang juga meyakini bahwa moko merupakan belis yang digunakan di Suku Abui sekaligus mewakili keragaman agama di Abui dari Kristen dan Islam.



Sumber: Dokumentasi penulis

Gambar 4. Proses wawancara



Sumber: dokumentasi penulis

Gambar 5. Peneliti Bersama Informan

Saat kami mewawancarai mereka di bawah pohon mangga di rumah Pak Sem Bangkay, penulis mendengar gaung kesatuan saat mereka akan beranjak pergi untuk mengurus kepanitiaan Pesparawi. Kekerabatan dan persaudaraan kental terasa dalam percakapan bersama saudara-saudara saya di AKHAM di rumah keluarga Bapak Sem Bangkay. Dan saat kami akan berpamitan untuk kembali ke Kalabahi pada pada Minggu siang, kami merasakan keramahan yang sangat tulus dan terbuka. Bahkan menjelang ojek yang kami tumpangi datang untuk menghantar kami, Bapak Yusuf Tangpeni hadir di rumah Bapak Sem untuk merestui kepulangan kami ke Kalabahi. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa mengecap pengalaman dan keramahan mereka selama 2-3 hari di sana melihat perubahan sejati terjadi, bahwa yang paling berkuasa namun merasa yang paling bodoh telah menyadari bahwa yang berkuasa menjadi yang paling mengerti, memahami dan menyadari bahwa kelangsungan generasi penerus, kaum perempuan diberdayakan dan anak-anak memiliki pendidikan tinggi.⁶

⁶ Anak mendapatkan akses dalam pendidikan dasar melalui intervensi ke Pendidikan Anak Usia Dini usia antara 3-6 tahun dapat bertumbuh dan berkembang untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dasar. Seorang ibu bernama Aneas Dakadjo (ibu dari seorang anak bernama Jerry) mengatakan *“anak saya merasakan kenyamanan belajar dan bermain di rumah sejak yang mengatur rumah saya menjadi ruang yang ramah untuk anak untuk belajar. Saya sebagai ibu bisa menyediakan makanan yang sehat dan mengajar anak di rumah dengan lebih baik. Anak saya jadi sehat dan jarang sakit.”*

DISKUSI

Perempuan Alor dalam pusaran belis ada dalam situasi terkungkung oleh budaya dan adat istiadat. Perempuan menjadi korban biaya mas kawin yaitu belis yang nominalnya sangat mahal dan langka. Akibatnya hak-hak perempuan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, menikah serta membangun keluarga tidak dapat dilaksanakan. Revitalisasi budaya merupakan upaya sinergi 3 tungku yaitu pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat yang difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia untuk membangun kesadaran baru yaitu menurunkan *mal* atau biaya belis secara wajar dan terjangkau. Kisah dari perspektif etnografi Bapak Yusuf Tangpeni sebagai kepala suku AKHAM melukiskan adanya hubungan semantik yang kuat antara pemberdayaan kaum perempuan dan kelangsungan hidup keluarga, kesempatan untuk menentukan masa depan dan mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Buah kebersamaan WVI dengan para tokoh adat, pemerintah dan agama, khususnya gereja, dalam gerakan revitalisasi budaya di Alor telah menghasilkan pasangan yang telah menikah secara adat dan gereja, sehingga mereka dapat mengikuti Perjamuan Kudus, dan juga anak-anak telah mendapat Akte Kelahiran. Suatu hal yang berdampak baik bagi masyarakat. Dampak dari gerakan revitalisasi ini dirasakan oleh beberapa pihak, antara lain:

1. Anak dan keluarga dalam pasangan yang menikah dengan mal baru,
2. Keluarga besar laki-laki dan perempuan bersatu dan perempuan tidak lagi menjadi korban kekerasan adat maupun kekerasan fisik dan psikis. Perempuan dapat menikah dengan mal baru yang lebih murah sehingga biaya sosial dapat dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan, dan ekonomi rumah tangga.
3. Gereja yang mendapat jemaat sudah berkat nikah kudus, sehingga meningkatkan jumlah umat, lalu klasis/paroki di Alor
4. Meningkatnya jumlah calon pengurus gereja (sebagai majelis/pengurus stasi).
5. Membaiknya hubungan agama dengan tokoh adat, agama dengan pemerintah, dan tokoh adat dengan pemerintah.

KESIMPULAN

Perempuan dalam pusaran belis di Alor berada pada posisi tidak berdaya karena tidak mendapatkan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi, biaya sosial melalui belis pernikahan yang tinggi menyebabkan kurangnya kesempatan untuk membangun hidup pernikahan yang sah diakui oleh adat, agama dan negara. Revitalisasi budaya adalah upaya yang dibangun dari kesadaran kolektif antara 3 tungku (yaitu tokoh agama, tokoh adat dan pemerintah) dengan difasilitasi pelaku pengembangan transformatif dari yayasan kemanusiaan Kristen yaitu Wahana Visi Indonesia sebagai “orang tengah” yang menjembatani antara keinginan “orang dalam” yang mau berubah. Perempuan yang diberdayakan mampu menduduki peran dalam kehidupan adat dan masyarakat. Kesetaraan gender ada dalam adat yang memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi. Kesepakatan bersama melalui nilai komunal positif yang dibangun menghasilkan pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan anak-anak dan keluarga untuk terbebas dari kemiskinan kultural, struktural yang telah membelenggu selama bertahun-tahun.

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa lokus Alor dengan suku-sukunya memiliki keunikan budaya dan tingkat keketatan budaya yang berlangsung secara turun menurun dengan tipe yang khusus. Oleh karena itu tidak bisa dilakukan generalisasi untuk pendekatan revitalisasi serupa di tempat lokasi lainnya (khususnya di Alor). Namun prinsip-prinsip revitalisasi dan tahapannya, siapa yang dilibatkan dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan perempuan dapat dilakukan di seluruh wilayah lain di Indonesia, khususnya NTT yang memiliki masalah serupa. Terkait dengan sudah ditetapkannya penguatan lembaga adat melalui pelembagaan dewan adat untuk menjaga kesepakatan komunal belis baru (biaya adat untuk menikah), maka penelitian berikutnya yang bisa dilakukan terkait revitalisasi adalah mengukur dampak penerbitan Peraturan Daerah tentang penguatan Lembaga Adat, sejauh mana efektif untuk membawa dampak terhadap pemberdayaan perempuan secara keseluruhan dalam peningkatan ekonomi dan partisipasi dalam pendidikan. Dampak PERDA merupakan bagian dari nilai komunal yang positif sehingga dapat digunakan setinggi-tingginya untuk keberlanjutan suatu suku, ataupun tahapan kehidupan manusia dan keturunannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan perempuan, anak dan masyarakat.

REFERENSI

- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic.
- Koesbardiati, Toetik. 2019. "Moko Dalam Budaya Orang Alor" dalam *Alor Untuk Ibu Pertiwi*. Jakarta: Penerbit Literatur Perkantas.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Suyanto, Bagong. 2018. *Berbagi Pengalaman Kearifan Dan Kepeduliaan Dalam Merevitalisasi Budaya Belis Masyarakat Alor: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.
- WVI. 2014. *Kutitipkan Damai Untukmu (Bunga Rampai Revitalisasi Budaya Alor)*. Jakarta: Wahana Visi Indonesia.
- WVI. 2019. *Alor Untuk Ibu Pertiwi Sekuntum Kembang Revitalisasi Budaya Malua Galiau*. Hasil Kerjasama WVI dan Pemda ALor. Jakarta: Penerbit Literatur Perkantas.